

**PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN
DALAM GUGATAN PERCERAIAN
DALAM WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
SUMATERA UTARA**

DISERTASI

OLEH :

**HELMILAWATI
NIM. 4001173048**

**PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
2023**



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 050 TAHUN 2023**

**TENTANG
PELAKSANAAN SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian pendidikan program Doktor pada Program Studi Hukum Islam mahasiswa Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan atas nama Helmilawati, NIM 4001173048, Judul Disertasi "Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Gugatan Perceraian Pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan Sumatera Utara", perlu diatur ketentuan tentang pelaksanaan Seminar Hasil Disertasi dalam bentuk Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia pelaksana Seminar Hasil Disertasi mahasiswa Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Sumatra Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

9. Surat Perintah Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 038087/B.II/3/2022, tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PELAKSANAAN SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**
- Kesatu : Menetapkan Pelaksana Seminar Hasil Disertasi Mahasiswa Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan atas nama Helmillawati, NIM. 4001173048, dengan susunan sebagai berikut:
- Ketua Seminar : Dr. Dhaiauddin Tanjung, M.A.
Sekretaris Seminar : Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum.
Penguji I : Prof. Dr. Pagar, M.A.
Penguji II : Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum.
Penguji III : Dr. Zulham, M.Hum.
Penguji IV : Dr. Fauziah Lubis, M.Hum.
Panitia : Gatot Teguh Arifyanto, M.H.
Muhammad Habib, M.H.I.
- Kedua : Tugas Panitia adalah:
- Mempersiapkan administrasi Seminar Hasil Disertasi;
 - Melaksanakan Seminar Hasil Disertasi;
 - Mengumumkan hasil Seminar Hasil Disertasi;
- Ketiga : Pelaksanaan Seminar Hasil Disertasi ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, 08 Maret 2023.
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2023.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan

Tanggal 30 Januari 2023

An. Rektor
Direktur



Hasan Bakti Nasution



Keputusan ini disampaikan kepada:

- Rektor UIN Sumatera Utara Medan
- Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
PASCASARJANA

Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253
Website: pascasarjana.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id

Nomor : B.6147 /PS.WD/PS.III/PP.00.9/01/2023 **30 Januari 2023**

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : Seminar Hasil Disertasi
An. Helmilawati, NIM. 4001173048

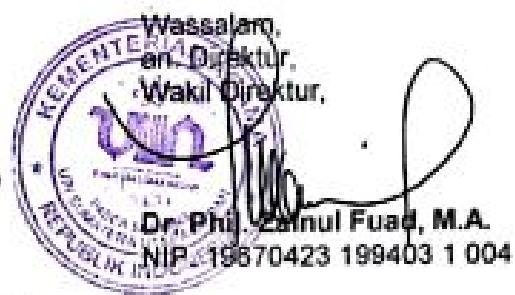
Kepada		
Yth.		
1.	Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A.	(Ketua Seminar)
2.	Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum.	(Sekretaris Seminar)
3.	Prof. Dr. Pagar, M.A.	(Penguji I)
4.	Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum.	(Penguji II)
5.	Dr. Zulham, M.Hum.	(Penguji III)
6.	Dr. Fauziah Lubis, M.Hum.	(Penguji IV)
di-		
	Tempat	

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat memimpin dan menguji Seminar Hasil Disertasi mahasiswa atas nama Helmilawati, NIM. 4001173048, Program Studi Hukum Islam, dengan Disertasi judul "Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Gugatan Perceraian Pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan Sumatera Utara", yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 08 Maret 2023
Pukul : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Gedung Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapan terima kasih.



Tembusan:
Direktor Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

PERSETUJUAN

DISERTASI

**PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN
DALAM GUGATAN PERCERAIAN
DALAM WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
SUMATERA UTARA**

Oleh:

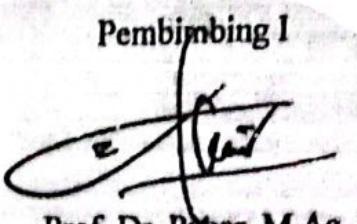
HELMILAWATI

NIM. 4001173048

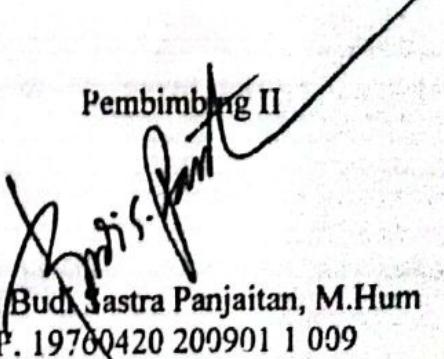
Dapat disetujui untuk mengikuti ujian Seminar Hasil Disertasi
sebagai persyaratan memperoleh gelar Doktor Hukum Islam (Dr)
pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara
Medan

Medan, Januari 2023

Pembimbing I


Prof. Dr. Pagar, M.Ag
NIP. 19581231 198803 1 016
NIDN. 2031125810

Pembimbing II


Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum
NIP. 19760420 200901 1 009
NIDN. 2020047602

PENGESAHAN UJIAN SEMINAR HASIL

Disertasi berjudul "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Gugatan Perceraian pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan Sumatera Utara", atas nama Helmilawati, NIM. 4001173048, Program Studi Hukum Islam, telah diuji dalam Seminar Hasil Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023.

Disertasi telah diperbaiki sesuai masukan dari Penguji dan telah memenuhi syarat diajukan untuk sidang tertutup pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 10 Maret 2023
Panitia Ujian Seminar Hasil
Pascasarjana UIN-SU Medan

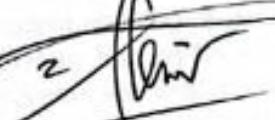
Ketua


Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I., MA
NIP. 19791020 200901 1 010
NIDN. 2020107903

Sekretaris


Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum
NIP. 19760420 200901 1 009
NIDN. 2020047602

Anggota


Prof. Dr. Pagar, M.Ag
NIP. 19581231 198803 1 016
NIDN. 2031125810


Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum
NIP. 19760420 200901 1 009
NIDN. 2020047602


Dr. Zulham, M.Hum
NIP. 197703212009011008
NIDN. 2021037702


Dr. Fauziah Lubis, M.Hum
NIP. 197105282008012013
NIDN. 2028057104

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Islam


Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I., MA
NIP. 19791020 200901 1 010
NIDN. 2020107903

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM GUGATAN PERCERAIAN PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN SUMATERA UTARA



Nama	: HELMILAWATI
NIM	: 4001173048
Prodi	: Hukum Islam
Tempat/tanggal lahir	: Muaratais / 13 April 1980
Nama orang tua Ayah	: Rahmad Harahap
Ibu	: Rosmina Siregar
Pembimbing	: 1. Prof. Dr. Pagar. M.Ag 2. Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum

Ketentuan mengenai nafkah pasca perceraian hanya diatur pada perceraian yang disebabkan oleh talak (perceraian yang diajukan oleh suami), namun tidak ada aturan terkait nafkah isteri pada perkara cerai gugat. Padahal dalam kenyataannya, sering kali isteri mengajukan gugatan cerai karena tidak terpenuhinya nafkah dari suami, dalam arti isteri hidup dalam keadaan menderita karena suami tidak menafkahi. Dalam hal ini terjadi ketimpangan hukum dalam memberikan perlindungan kepada perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Penelitian ini bertujuan memberikan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam cerai gugat, berupa nafkah iddah, mutu'ah dan nafkah madhiyah (nafkah terutang).

Penelitian ini termasuk dalam penelitian field research dengan mengambil sampel Pengadilan Agama dalam wilayah Hukum pengadilan Tinggi Agama Medan Sumatera Utara, yaitu Pengadilan Agama Binjai, Pengadilan Agama Kisaran dan Pengadilan Agama Panyabungan, dengan alat pengumpul data yang digunakan wawancara dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori masalah mursalah dan teori hukum progressive.

Hasil penelitian menunjukkan dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara belum sepenuhnya melaksanakan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Perempuan dalam cerai gugat belum mendapatkan haknya pasca perceraian berupa nafkah iddah, mutu'ah dan nafkah madhiyah. Untuk perkara cerai gugat yang menuntut hak-hak perempuan pasca perceraian, Hakim berpendapat jika perempuan dapat membuktikan penghasilan suaminya, maka dapat dikabulkan dengan pertimbangan kelayakan dan kepatutan. Untuk memudahkan eksekusi terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka dari awal gugatan sudah dimasukkan harta suami yang dapat di eksekusi apabila suami lalai melaksanakan kewajibannya dan Pengadilan Agama juga melakukan tindakan menahan Akta cerai Tergugat sampai Tergugat membayar hak-hak perempuan pasca perceraian.

Kata Kunci : Hak perempuan pascaperceraian, cerai gugat

ABSTRACT

PROTECTION OF WOMEN'S RIGHTS IN DIVORCE LAW IN THE JURISDICTION OF THE MEDAN RELIGIOUS HIGH COURT



Name	:	HEMLAWATI
NIM	:	4001173048
Program Study	:	Hukum Islam
Place and date of birth	:	Muaratais / 13 April 1980
Father's parents name	:	Rahmad Harahap
Mother's parents name	:	Rosmina Siregar
Advisor	:	1. Prof. Dr. Pagar. M.Ag 2. Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum

Provisions regarding post-divorce maintenance are only regulated for divorces caused by talak (divorce filed by the husband), but there are no rules regarding the maintenance of the wife in contested divorce cases. Whereas in reality, the wife often files for divorce because the husband does not fulfill the maintenance, in the sense that the wife lives in a state of suffering because the husband does not provide a living. In this case there is a legal imbalance in providing protection to women when dealing with the law. This study aims to provide protection for post-divorce women's rights in a contested divorce, in the form of living iddah, muth'ah and madhiyah maintenance (income owed).

This research is included in field research by taking samples of the Religious Courts within the Legal jurisdiction of the High Religious Court of Medan, North Sumatra, namely the Binjai Religious Court, the Kisaran Religious Court and the Panyabungan Religious Court, with data collection tools used interviews and document studies. The theory used in this study is the maslahah mursalah theory and progressive law theory.

The results of the research show that in the area of the High Religious Court of North Sumatra it has not fully implemented Perma Number 3 of 2017 concerning guidelines for adjudicating cases of women dealing with the law. Women in a divorce lawsuit have not got their rights post-divorce in the form of iddah, muth'ah and madhiyah maintenance. For contested divorce cases demanding women's rights post-divorce, the Judge is of the opinion that if a woman can prove her husband's income, then it can be granted with consideration of eligibility and propriety. To facilitate the execution of women's rights after the divorce, from the start the lawsuit included the husband's assets which could be executed if the husband neglected to carry out his obligations and the Religious Courts also took action to hold the Defendant's divorce certificate until the Defendant paid for the women's rights post-divorce.

Keywords: Post-divorce women's rights, contested divorce

ملخص

حماية حقوق الزوجة في دعوى للطلاق الصادر من الزوجة في ولاية محكمة الاستئناف الشرعي ميدان سومطرة الشمالية

اسم الطالبة	: هيلميلاواتي
رقم القيد	: 4001173048
شعبة	: الشريعة الإسلامية
مكان/تاريخ الميلاد	: موارا نانس/13 أبريل 1980
اسم الأب	: رحمة هارابا
اسم الأم	: رامسينا سيريجار
المشتشار	: 1. الأستاذ الدكتور فاجار
	2. الدكتور بودي ماسينا فنجيانان



يتم تنظيم الأحكام المتعلقة بنفقة الزوجة بعد الطلاق، فقط في حالات الطلاق الذي يقدمه الزوج، ولكن لا توجد قواعد تتعلق بنفقة الزوجة في حالات رفع دعوى للطلاق الذي يقدمها الزوجة في المحكمة الشرعية باندونيسيا. غالباً دعوى الطلاق الصادر من الزوجة، بسبب عدم الوفاء بحقه في النفقة على زوجته. بمعنى أن الزوجة تعيش حالة معاناة لأن الزوج لا يكسب لقمة العيش. في هذه الحالة، يوجد خلل قانوني في توفير الحماية للمرأة عند التعامل مع القانون. تهدف هذه الدراسة إلى توفير الحماية لحقوق الزوجة بعد الطلاق في حالة دعوى للطلاق الصادر من الزوجة، وهي المتعة، العدة، والنفقة الماضية.

هذا البحث هو البحث الميداني من خلالأخذ عينات من المحاكم الشرعية في ولاية محكمة الاستئناف الشرعي ميدان سومطرة الشمالية، وهي المحكمة الشرعية بنجاي والمحكمة الشرعية كيسaran والمحكمة الشرعية بانيابونجان، مع أدوات جمع البيانات المستخدمة المقابلات والدراسات الوثائقية. النظرية المستخدمة في هذه الدراسة هي نظرية المصلحة المرسلة ونظرية القانون التقديمي. تظهر نتائج البحث، أنها في المحاكم الشرعية في ولاية محكمة الاستئناف الشرعي ميدان سومطرة الشمالية، لم تتفق بالكامل قواعد المحكمة العليا رقم 3 لعام 2017 ، فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية للفصل في قضايا المرأة التي تتعامل مع القانون. الزوجة التي رفعت دعوى للطلاق في المحاكم الشرعية، لم تحصل على حقوقها بعد الطلاق كالمتعة والعدة والنفقة الماضية. في تلك القضايا التي تطلب تلك النفقة، يرى القاضي أنه إذا تمكنت المرأة من إثبات دخل زوجها، فيمكن منها مع مراعاة الأهلية واللياقة. لتسهيل تنفيذ حقوق المرأة بعد الطلاق، تضمنت الدعوى منذ البداية أصول الزوج التي يمكن تنفيذها. إذا أهمل الزوج تنفيذ التزاماته، كما اتخذت المحاكم الشرعية إجراءات لاحتفاظ بشهاده طلاق المدعى عليه حتى دفع المدعى عليه لجميع حقوق الزوجة بعد الطلاق.

الكلمات المفتاحية : حقوق الزوجة بعد الطلاق ، رفع دعوى للطلاق

OUTLINE

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSILITERASI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I . PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Batasan Istilah	17
D. Tujuan Penelitian	20
E. Kegunaan Penelitian	20
F. Kajian Terdahulu	21
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II . METODOLOGI PENELITIAN

A. Kerangka Teori	25
a. Maqasyid Syar'iyyah	26
b. Teori Hukum Progressive	31
B. Metode Penelitian	36
1. Jenis Penelitian	37
2. Sumber dan Metode Pengumpulan Data	38
3. Instrumen Pengumpulan Data	39
4. Uji Keabsahan Data	40
5. Metode Analisa	40
6. Lokasi Penelitian, waktu dan sampel Penelitian	41
7. Teknik Analisis Data	45

BAB III TINJAUAN UMUM CERAI GUGAT

A. Cerai Gugat Dalam Hukum Islam	46
B. Dasar Hukum Cerai Gugat	60
C. Tata Cara Mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan	68
D. Akibat Hukum Cerai Gugat	77
E. Hak-hak Perempuan dalam Gugatan Perceraian	83

BAB IV : PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM GUGATAN PERCERAIAN

A. Hak Perempuan Dalam Gugatan Perceraian	88
B. Ex officio Terhadap Hak-hak Perempuan dalam Cerai Gugat .	130
C. Pertimbangan Hakim Untuk Melindungin Hak-Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat	143
D. Eksekusi terhadap putusan hakim mengenai hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat	161

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	176
B. Saran-Rekomendasi	178
Daftar Pustaka	180
Lampiran-Lampiran	
Daftar Riwayat Hidup	